

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi yang konsumtif adalah penyebab utama meningkatnya produksi sampah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, masalah sampah menjadi semakin kompleks dan sulit diatasi. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dapat berpotensi menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.¹ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, semakin banyak penduduk dan semakin tinggi tingkat konsumsi kita, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan, baik dalam jumlah maupun jenis.²

Meningkatnya volume sampah menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Akibat pengelolaan sampah yang tidak baik, kita dapat menghadapi masalah kesehatan, pencemaran udara, air, dan tanah, serta gangguan estetika dan kebisingan. Selain itu, masalah sampah juga dapat berdampak pada aspek sosial masyarakat. Tujuan utama pengelolaan sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Penampungan Akhir (TPA).³

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022 bahwa Produk sampah di Indonesia mencapai 34 juta/ton dan sumber sampah berasal dari 48% sampah rumah tangga, 24% sampah pasar tradisional, 9% sampah kawasan komersial, 4% sampah sekolah, 6% sampah kantor, 7,5% sampah jalan dan 2,4% sampah lainnya. Sedangkan pengelolaan sampah di Provinsi Jambi menurut data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan dari total sampah yang dihasilkan, hanya sekitar 59,13% yang dikelola. Cara pengelolaan yang paling umum adalah dengan membakar sampah (25,9%), diikuti dengan membuang ke parit (9,7%). Praktik membuang sampah sembarangan juga masih cukup tinggi (3,3%). Metode

Berdasarkan Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022, bahwa produksi sampah harian mencapai 239,02 ton. Angka pengangkutan sampah hanya sebesar 41,35 ton (17,3%) dari total produksi, sedangkan sisanya sebesar 197,67 ton (82,7%) tidak terangkut. Data ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga memberikan

kontribusi paling signifikan terhadap permasalahan pengelolaan sampah di wilayah tersebut, mencapai persentase sebesar 75%.⁷

Akibat dari banyaknya sampah yang dihasilkan, terdapat persentase sementara sebaran TPSS legal dan ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada gambar 1.2 dijelaskan mengenai presentase sebaran tempat penampungan sampah sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:⁶

Gambar 1. 2 Presentase Sebaran Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Sumber: Artikel Pemetaan Dan Analisis Tempat Penampungan Sampah Sementara Di Provinsi Jambi⁶

Berdasarkan gambar 1.2, bahwa data sebaran TPSS ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan presentase lebih besar yaitu 55% dan persentase TPSS legal yaitu 45%.⁶ Dengan masih banyaknya TPSS ilegal membuat masalah semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.⁸

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 mengatur agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.⁹ Kegiatan pengangkutan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan jadwal rutin setiap hari kecuali hari minggu

mulai pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB. Untuk menunjang kegiatan ini, DLH telah menyiapkan 8 armada pengangkut sampah.¹⁰

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja dan program tahunan, serta membuat kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dinas juga memberikan bimbingan dan pengarahan kepada staf agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dalam rangka pengembangan wilayah, dinas juga bertugas menetapkan rencana strategis untuk bidang perumahan dan kawasan permukiman.¹¹

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam memastikan semua tugas bawahan dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, dinas juga mengatur dan menjalankan semua kegiatan yang ada, serta menjadi pusat koordinasi untuk semua urusan perizinan dan rekomendasi. Untuk memastikan kinerja yang optimal, dinas secara berkala melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap tugas bawahan. Terakhir, dinas juga wajib menyusun laporan berkala kepada atasan tentang hasil kerja yang telah dicapai.¹¹

Hasil penelitian Mulyadi (2023) Kinerja pengelolaan sampah di TPA Lubuk Terentang, Kec. Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat masih jauh dari optimal akibat kurangnya fasilitas pengolahan sampah modern dan tenaga kerja yang terlatih. Hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar.¹²

Penelitian yang sama dilakukan oleh Kristian Agung (2021) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia seringkali tidak efektif akibat keterbatasan sumber daya pemerintah, seperti anggaran, personel, dan peralatan. Selain itu, masalah juga muncul dalam aspek teknis operasional, kelembagaan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat tren yang positif di mana upaya untuk mengurangi produksi sampah, terutama sampah organik, melalui keterlibatan masyarakat semakin mendapat perhatian. Paradigma pengelolaan sampah

yang sebelumnya lebih berfokus pada pembuangan kini mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan.¹³

Penelitian Erlan Siswandi Wahyudin (2018) mengidentifikasi 43 titik tempat penampungan sampah sementara (TPSS) ilegal di 9 kelurahan di Mataram. Lokasi TPSS ilegal ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti kondisi geografis dan faktor manusia seperti kepadatan penduduk, jenis jalan, penggunaan lahan, serta jarak dari sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar TPSS ilegal (sekitar 60%) berjarak kurang dari 15 meter dari sungai dan terletak di jalan atau lingkungan pemukiman. Kondisi ini sangat berpotensi mencemari lingkungan sekitar.

14

Hasil penelitian Kodi Rina Mariani Gobai (2021), bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Nabire masih belum optimal. Meskipun demikian, terdapat bukti bahwa kinerja pengelolaan sampah yang kurang baik berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan.¹⁵

Hasil penelitian Alfons (2018), pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi faktor utama meningkatnya produksi sampah. Akan tetapi, infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah, tidak mampu menampung volume sampah yang semakin besar, sehingga berdampak negatif pada lingkungan.¹⁶ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Rana Djiha (2020), menunjukkan bahwa tingginya rata-rata timbulan sampah sebesar 2,16 kg per kapita per hari merupakan tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Untuk mencapai target pelayanan 100% dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, diperlukan investasi yang signifikan dalam peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, seperti tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sementara, dan fasilitas pengolahan sampah lainnya. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.¹⁷

Berdasarkan observasi dan survey awal yang dilakukan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan bahwa TPSS

yang tersedia masih membuat kebiasaan membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya masih menjadi masalah. Hal ini terbukti dari praktik masyarakat yang membuang sampah di sekitar lingkungan pemukiman, saluran air, jalan, serta adanya sejumlah tempat pembuangan sampah sementara yang ilegal.

Sedangkan, pelaksanaan program pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi kurangnya armada pengangkut sampah, fasilitas pendukung, dan keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah juga menjadi faktor penghambat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, bahwa observasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan analisis mendalam terhadap manajemen pengelolaan sampah dengan menggunakan kerangka kerja PDCA (*Plan, Do, Check, Act*). Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis Manajemen PDCA (*Planning, Do, Check, Ac*) Pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tempat penampungan sampah di tanjung jabung barat.
2. Menganalisis perencanaan tempat penampungan sampah sementara di tanjung jabung barat.

3. Menganalisis pengerjaan tempat penampungan sampah sementara di kabupaten tanjung jabung barat.
4. Menganalisis pengecekan tempat penampungan sampah sementara di kabupaten tanjung jabung barat.
5. Menganalisis tindak lanjut tempat penampungan sampah sementara di kabupaten tanjung jabung barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pengelolaan TPSS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4.2 Bagi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada, sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi masalah sampah dan meningkatkan nilai estetika lingkungan.

1.4.3 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, khususnya mahasiswa, dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut. Selain itu, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya perbaikan dan pengembangan di tingkat institusi.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperdalam pemahaman teoritis dan sekaligus mengaplikasikannya dalam konteks riil, sehingga menghasilkan temuan yang lebih relevan dan bermakna.